

Penataan Sistem Manajemen SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Mengingat begitu pentingnya SDM Aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam Reformasi Birokrasi aspek SDM Aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Program diatas bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi.

Adapun capaian rencana aksi sebagaimana tabel berikut dibawah:

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan (Data Dukung)	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase PD yang memiliki pegawai sesuai dengan perhitungan kebutuhan pegawai	75%		Belum semua pegawai memiliki pegawai sesuai dengan kebutuhan	Biro Organisasi
2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Persentase Kepatuhan terhadap proses penerimaan pegawai yang berkualitas (ada kriteria)	100%	100%	Pengumuman pendaftaran CPNS dan pengumuman kelulusan administrasi	BKD
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Gap Kompetensi ASN	30%	30%	hasil asesment terhadap 200 pejabat pengawas pada bulan nopember 2019 yang akan dianalisis dan disusun rencana pengembangan kompetensinya per individu pada tahun 2020	Biro Organisasi, BKD, BPSDM

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan (Data Dukung)	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan promosi terbuka yang berkualitas (ada kriteria)	100%	100%	surat rekomendasi KASN nomor B-4504/KASN/12/2019 tentang rekomendasi hasil uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	BKD
5	Penetapan kinerja individu	Persentase PD yang mengukur kinerja individunya secara periodik (triwulan)	-	-	Belum melaksanakan pengukuran kinerja individu	BKD
		Rasio kontribusi capaian kinerja terhadap penghitungan tunjangan kinerja	40%	-	Perhitungan tunjangan kinerja belum berdasarkan capaian kinerja. perhitungan tunjangan kinerja (TPP) masih berdasarkan beban kerja dan kehadiran pegawai.	
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Persentase penurunan jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	2%	2%	penetapan SK Penjatuhan hukuman disiplin	BKD
		Persentase PD yang menerapkan disiplin dengan baik (ada kriteria)	60%	60%	rekapitulasi pelaporan kehadiran pegawai (absensi) setiap bulannya.	
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	1 dok	1 dok		Biro Organisasi
8	Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaiannya yang mutakhir pada aplikasi PNS Online	80%	80%	data dokumen pada pns online	BKD